

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya mengenai “Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) 1948-1950: *Dari Pembentukan Komisi Reorganisasi (KRAL) hingga Terbentuknya Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL)*”, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi angkatan bersenjata dan seluruh aparat negara yang dikeluarkan oleh Hatta pada tahun 1948 pada dasarnya adalah untuk mengefisiensikan jumlah tentara yang ada di Indonesia. Kebijakan ini mulai resmi diberlakukan setelah Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tanggal 2 Januari 1948. Dalam lingkungan TNI-AL, implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan membentuk suatu organisasi yang bernama Komisi Reorganisasi ALRI (KRAL) serta mengangkat Kolonel R. Soebijakto sebagai ketuanya.

Kehadiran KRAL ini mempunyai beberapa pengaruh penting dalam perkembangan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) atau yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). Salah satu pengaruh terbesar dari keberadaan KRAL ini adalah berkurangnya konflik internal. Dalam sejarah perkembangan ALRI, konflik ini memang tidak bisa

Rifky Azhari, 2012

Reorganisasi dan Rasionalisasi...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dipisahkan. Konflik ini terjadi antara Marine Keamanan Rakyat (MKR) dengan ALRI. Dampak dari konflik tersebut adalah muncul dualisme komando dalam tubuh ALRI. Langkah awal untuk memecahkan konflik ini adalah melalui Keputusan Presiden No. 97A-47 tanggal 28 Juli, atas usul Dewan Angkatan Laut telah dibentuk Pucuk Pimpinan ALRI (PP ALRI). Pada kenyataannya, kondisi yang kacau ini belum mampu terselesaikan, hingga dibentuknya KRAL.

Salah satu kebijakan yang dilakukan ketika terjadi Reorganisasi dan Rasionalisasi ALRI ini adalah menghidupkan kembali unsur infanteri ALRI, yang bernama KKO-AL. Pada tanggal 9 Oktober 1948 Menteri Pertahanan dengan surat keputusan No. A 565/1948 menetapkan adanya Korps Komando di dalam lingkungan ALRI. Dengan kehadiran Corps Mariniers yang berganti nama menjadi Korps Komando ini diharapkan agar kondisi militer Indonesia semakin kuat, khususnya melihat kondisi Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami Agresi Militer oleh Belanda.

Untuk meningkatkan profesionalismenya, pada tahun 1950 Selection Board mengadakan seleksi calon personil KKO-AL. Penambahan wawasan dalam bidang kemiliteran dilakukan dengan mengadakan kursus tambahan bagi semua perwira, bintara dan tamtama yang akan dilakukan di dalam maupun luar negeri. Pusat Pendidikan KKO-AL juga didirikan pada masa itu.

Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam Angkatan Laut ini hanya berhasil dilaksanakan di Jawa saja, hal ini dikarenakan beberapa hambatan yang ada. Hambatan tersebut, antara lain:

Rifky Azhari, 2012

Reorganisasi dan Rasionalisasi...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Terjadinya pemberontakan-pemberontakan dalam negeri yang melibatkan beberapa personil TNI-AL

Peristiwa yang melibatkan beberapa personil ALRI adalah Peristiwa Madiun 1948. Keterlibatan beberapa mantan personilnya yang merasa kecewa terhadap hasil keputusan dari Komisi Reorganisasi memang dinilai sebagai penghambat terjadinya proses RERA TNI-AL.

2. Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II menyebabkan konsentrasi ALRI dalam melaksanakan RERA terpecah. Akibat dari Agresi Belanda ini Markas Besar ALRI yang semula berkedudukan di Yogyakarta terpaksa dipindahkan ke Aceh.

Ternyata diadakannya Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI-AL berdampak terhadap dinamika politik nasional. Dampak yang ditimbulkan dari RERA TNI-AL ini adalah meletusnya Peristiwa Madiun 1948. Peristiwa ini berawal dari kekecewaan beberapa pihak akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh KRAL. Beberapa pihak ALRI yang terlibat adalah Atmadji, Katamhadi, Ahmad Jadao serta anggota Front Demokrasi Rakyat (FDR). Berkat kerja sama komponen ALRI dengan beberapa pihak Angkatan Darat, pemberontakan ini dapat diredam.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, sebenarnya ada satu “benang merah” yang tidak bisa dipisahkan dari keempat kesimpulan tersebut. Hal yang dimaksudkan adalah bahwa inti dari dikeluarkannya kebijakan RERA ini adalah untuk membuat militer Indonesia menjadi lebih kuat dan profesional. Kehadiran sosok tentara seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjaga

Rifky Azhari, 2012

Reorganisasi dan Rasionalisasi...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kedaulatan negaranya. Ketika negara sudah memiliki tentara yang kuat dan profesional, kehadiran tentara bayaran akan sangat tidak diperlukan. Terlebih jika kita melihat pendapat Machiavelli yang menyebutkan dampak suatu negara apabila menggunakan tentara bayaran.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal dari penelitian tentang RERA TNI-AL ini yang perlu diteliti lebih lanjut, antara lain mengenai keterlibatan Atmadji dalam peristiwa Madiun 1948. Penjelasan mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi ini memang kurang dibahas secara rinci, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber atau data yang membahas mengenai tentang keterlibatan Atmadji dalam peristiwa Madiun 1948 berhubungan dengan dampak RERA terhadap dinamika politik nasional. Selain itu, pada penelitian skripsi ini tidak terlalu fokus membahas tentang keterlibatan Atmadji dalam peristiwa Madiun 1948. Menurut penulis, hal tersebut akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian tentang RERA TNI-AL. Hal ini juga sesuai dengan sifat keilmuan yang terus berkembang. Untuk itu, pada masa yang akan datang penulis mengharapkan perlu adanya pengembangan penelitian tentang RERA TNI-AL, khususnya yang membahas tentang keterlibatan Atmadji dalam peristiwa Madiun 1948 sebagai dampak dari adanya RERA TNI-AL.

5.2. Saran

Salah satu kegunaan sejarah adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif menurut Notosusanto (Supardan, 2008: 309) adalah sejarah membawa dan

Rifky Azhari, 2012

Reorganisasi dan Rasionalisasi...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mengajarkan kebijaksanaan atau kearifan-kearifan. Beberapa peristiwa yang terjadi selama proses Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI-AL 1948-1950 sebenarnya dapat memberikan kepada kita suatu pelajaran penting. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus menyikapi segala macam perubahan kebijakan dengan arif dan profesional, bukan malah menyikapi segala perubahan kebijakan dengan memunculkan konflik dikemudian hari. Apa yang dilakukan Atmadji dan kawan-kawan telah memberikan pelajaran nyata kepada kita bahwa ketika suatu kebijakan ditanggapi dengan negatif (yang berdampak kepada konflik), maka kerugian yang akan diperoleh. Kontribusi positif yang diberikan Atmadji selama memimpin MKR, hilang ketika beliau memilih untuk meninggalkan kesatuan yang telah membesarkan namanya (Tentara Laut). Seandainya Atmadji mampu menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh KRAL dengan bijak dan profesional, maka bukan tidak mungkin beliau menjadi orang yang akan selalu dikenang jasa dan baktinya dalam sejarah kemiliteran di Indonesia.

Pelajaran selanjutnya yang diperoleh dari RERA ini adalah tentang bagaimana cara membentuk tentara yang kuat dan profesional. Terdapat beberapa hal penting yang harus diprioritaskan untuk membentuk tentara menjadi kuat dan profesional, yakni:

1. Menjaga solidaritas dikalangan tentara

Solidaritas dikalangan tentara memang perlu diperhatikan agar tidak terjadi konflik di dalam intern kesatuan tentara tersebut. Dengan

munculnya konflik internal, akan menyebabkan solidaritas antar tentara terpecah.

2. Membuat suatu kurikulum pendidikan tentara yang profesional

Kurikulum pendidikan tentara memang penting, dari sinilah tentara akan mendapatkan pengetahuan mengenai persenjataan, wawasan kemiliteran dan pendidikan profesional dalam hal ketentaraan.

